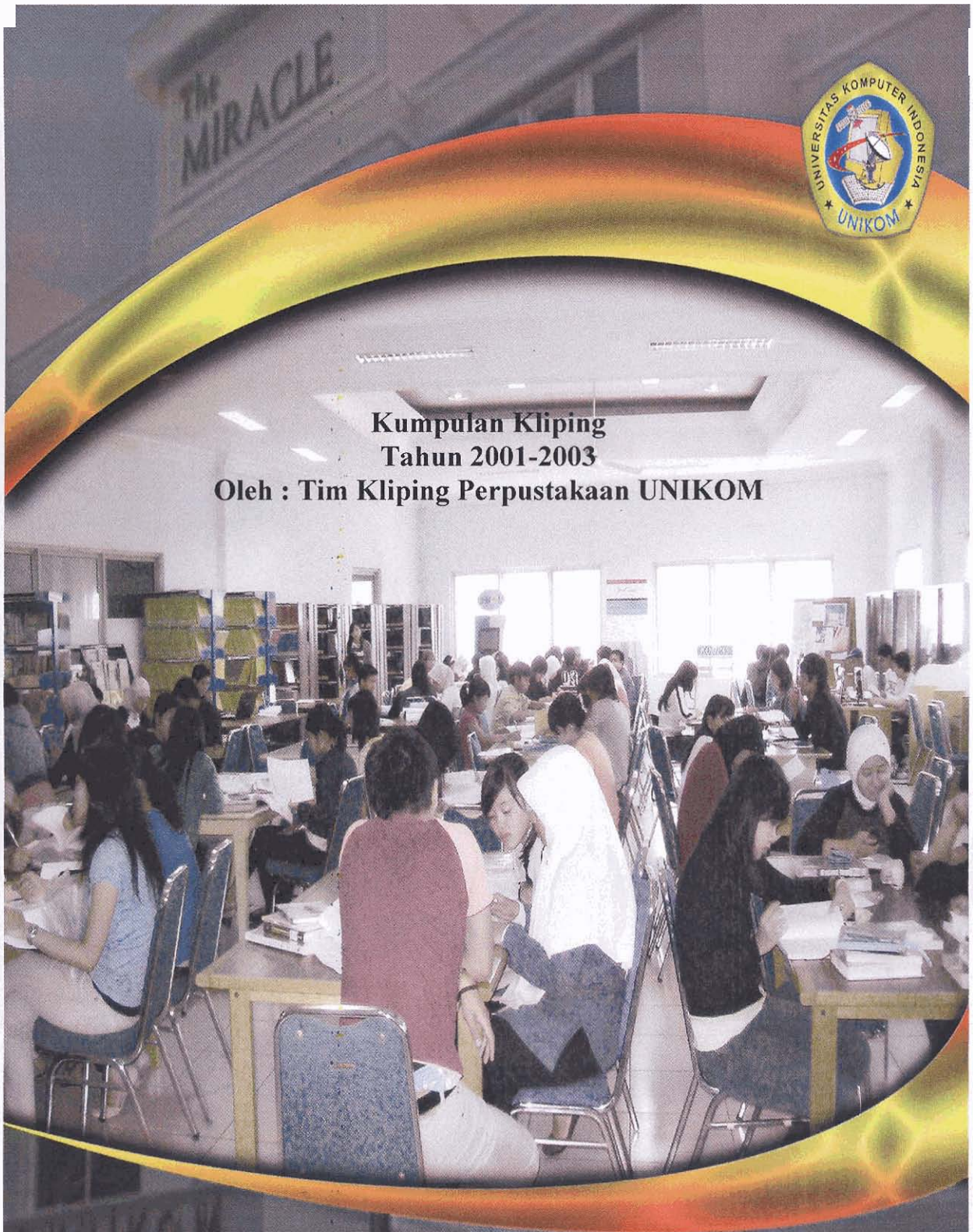


Kumpulan Kliping
Tahun 2001-2003
Oleh : Tim Kliping Perpustakaan UNIKOM

perpustakaan unikom

learning and get friendly with library

gedung 5 lantai 7
e-mail : perpus@unikom.ac.id

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 7 / JUNI / 2002
Hlm/Kolom : 9 /
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis :
Subjek / NO. CLASS : PENDIDIKAN / 379

Investasi Pendidikan Perlu Diatur UU

JAKARTA, KOMPAS — Maraknya lembaga pendidikan asing yang mengincar "pasar" pendidikan di Indonesia perlu dilihat secara hati-hati. Oleh karena itu, investasi pendidikan—terutama dari lembaga pendidikan asing—perlu dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Hanya saja, pendidikan hendaknya jangan sampai disamakan dengan komoditas perdagangan.

Demikian diungkapkan Ketua Komite Reformasi Pendidikan (KRP) Prof Suyanto MEd PhD seusai pertemuan antardepartemen di Jakarta, Kamis (6/6), untuk mempersiapkan masukan terhadap RUU Sisdiknas yang kini sedang disusun Komisi VI DPR. "Bagi saya, ada bahayanya jika pendidikan dijadikan komoditas. Bisa-bisa orientasi lembaga pendidikan sekadar mencari keuntungan saja," ujarnya.

Suyanto mengusulkan agar terminologi yang cenderung memunculkan kesan *profit oriented*, seperti investasi dan modal, tidak dipergunakan di dalam RUU Sisdiknas. Sebab, biar bagaimanapun pendidikan harus tetap memiliki orientasi sosial.

Menurut anggota KRP Prof Dr S Hamid Hasan MA, persoalan investasi pendidikan ini mungkin akan dijadikan satu pasal tersendiri dan perlu dipersiapkan peraturan pemerintah (PP)-nya. Selain itu, hasil masukan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Keuangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah memberikan gambaran yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Misalnya, apakah pendidikan bisa diperlakukan seperti barang komoditi lainnya? Atau, sampai sejauh mana investasi asing di bidang pendidikan—kalau diizinkan di Indonesia—diperbolehkan beroperasi; apakah boleh hingga tingkat kecamatan dan kabupaten atau cukup hanya di tingkat provinsi saja.

"Harus diakui, lembaga pendidikan bukanlah organisasi nirlaba. Jadi, kalaupun ada investasi maka investasi itu memiliki tujuan yang berbeda dengan investasi bisnis. Ini memang betul bukan bisnis biasa, tetapi kalau semakin banyak orang Indonesia yang memanfaatkan lembaga pendidikan asing tentu akan membuat Indonesia semakin banyak kehilangan devisa," ujarnya.

Menurut Hamid, sebelum mempersiapkan pasal tentang investasi pendidikan, harus dilihat dulu bagaimana memposisikan investasi di bidang pendidikan itu. Selain itu, perlu dipertimbangkan juga kebutuhan masyarakat yang menginginkan adanya lembaga pendidikan yang bermutu. "Apalagi, sulit bagi negara kita untuk menghentikan sama sekali serbuan investasi asing di bidang pendidikan ini," ujarnya.

Target APBN

Mengenai penetapan minimal 20 persen dari total APBN dialokasikan untuk anggaran pendidikan, Suyanto melihatnya sebagai sesuatu yang positif. Oleh karena itu, pemerintah dinilai sudah saatnya menunjukkan keseriusan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memperlihatkan keberanian mendukung usulan DPR mematok 20 persen APBN untuk anggaran pendidikan.

"Ini justru harus dijadikan kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa pemerintah memiliki *political will*. Kalau tidak sekarang kapan lagi pemerintah mau menunjukkan *political will* untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional. Apalagi negara kita sekarang termasuk negara miskin yang memiliki anggaran pendidikan terendah," ujarnya.

Berdasarkan masukan dari Departemen Keuangan, menurut Suyanto, sampai saat ini belum ada pembahasan dan sosialisasi khusus tentang target 20 persen APBN untuk pendidikan. Dalam kaitan ini Departemen Keuangan akan segera melakukan *review* tentang visibilitasnya atas target 20 persen APBN ini.

Persoalan lain yang muncul dalam pertemuan tersebut, menurut Hamid, adalah tentang keberadaan lembaga pendidikan kedinasan. Hal yang dipersoalkan adalah apakah sekarang ini lembaga-lembaga pendidikan kedinasan itu masih dibutuhkan atau bisa menjadi lembaga pendidikan terbuka bagi masyarakat luas.

"Apalagi saat ini jumlah pegawai negeri sipil yang dibutuhkan cenderung berkurang, kalau tidak mau dikatakan bahwa saat ini dari segi jumlah sudah terlalu banyak," ujarnya.

Mengenai persiapan terhadap usulan pemerintah bagi RUU Sisdiknas ini, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas Boediono mengatakan, setiap saat pemerintah siap mengusulkan masukan jika diminta DPR. Oleh karena itu, masukan-masukan yang akan diberikan harus sudah dikoordinasikan dengan seluruh departemen pemerintah. "Jangan sampai ada usulan dari pemerintah yang bertentangan dengan aturan dari pemerintah sendiri yang dibuat departemen lain," ujarnya. (MAM)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 6 / FEBUARI / 2002
Hlm/Kolom : 7 / 1-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : SUYANTO
Subjek /NO. class : PENDIDIKAN DAN NEGARA / 379.

Persoalan Klasik Anggaran Pendidikan Nasional

PERSOALAN anggaran pendidikan di negeri ini sungguh merupakan masalah yang amat pelik untuk dipecahkan. Hal ini terjadi karena sejak bangsa ini memproklamirkan kemerdekaannya, pendidikan belum pernah menjadi panglima bagi proses pembangunan nasional yang sanggup memberdayakan kehidupan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Padahal, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (yang tak akan pernah diamandemen sampai kapan pun), dengan jelas disebutkan bahwa pencerdasan kehidupan bangsa merupakan salah satu mandat yang amat penting untuk dilakukan bagi penyelenggara negara.

Dengan memahami makna Pembukaan UUD 1945 secara benar, seharusnya sejak dulu-dulu anggaran pendidikan memperoleh perhatian yang besar. Namun, hal itu tidak pernah terjadi karena ternyata penyelenggara negara ini secara kolektif sejak proklamasi kemerdekaan dikumandangkan tidak pernah memiliki keyakinan terhadap adanya kemanfaatan politis, jika melakukan investasi besar-besaran di dunia pendidikan. Konsekuensinya, pendidikan selalu tidak menjadi prioritas dalam setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Membiayai pendidikan memang ibarat melakukan investasi. Jadi, hasilnya baru dapat dilihat satu generasi berikutnya. Dengan demikian, untuk melakukan investasi di bidang pendidikan, perlu sikap dan kemauan politis pemerintah yang visioner. Sikap seperti itu tidak pernah terjadi sejak pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, maupun pemerintahan setelah tumbangnya Orde Baru sampai saat ini.

Sikap visioner di bidang pendidikan dapat kita lihat dari sejarah bangsa Jepang. Pada akhir Perang Dunia II, ketika Jepang kalah dalam peperangan itu, Kaisar justru bertanya kepada para pembantunya: berapa guru yang masih hidup. Ia bukan bertanya berapa tank yang masih tersisa atau berapa tentara yang masih hidup. Visi ini menunjukkan bahwa Jepang pada waktu itu akan dibangun ke masa depan, setelah remuk redam dalam Perang Dunia II dengan basis pembangunan sektor pendidikan. Hasilnya, seperti saat ini, mereka menguasai ekonomi dunia. Di Tanah Air kita saat ini tak satu daerah pun yang tidak disentuh oleh ekspor hasil teknologi Jepang sebagai mesin ekonominya.

Mestinya kita belajar dari kebenaran sejarah bangsa Jepang ini. Kalau mau begitu, tentu anggaran pendidikan harus mendapatkan analisis dan alokasi yang rasional, visioner, serta mampu memberdayakan sektor pendidikan secara nasional.

Dilihat dari sisi anggaran pendidikan, pemerintah mana pun yang sudah pernah berkuasa di negeri ini sampai saat ini belum ada yang memiliki *political will* (kemauan politik) yang positif terhadap sektor pendidikan. Anggaran pendidikan selalu berada amat jauh di bawah standar kebutuhan minimal, jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan di negara-negara yang pendidikannya maju seperti Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Swedia. Negara-negara itu sudah memiliki *political will* yang baik terhadap sektor pendidikan. Oleh karena itu, anggaran pendidikan mereka rata-rata berada pada sekitar delapan persen dari GNP atau kalau diukur dengan APBN berada pada sekitar 30 persen dari APBN.

Oleh sebab itu, kinerja pendidikan mereka sangat bagus, berkualitas, sekaligus memiliki relevansi yang tinggi terhadap perkembangan teknologi. Sebaliknya, untuk saat ini anggaran pendidikan kita sungguh berada jauh di bawah standar kewajaran. Jika diukur dari GNP, anggaran pendidikan kita hanya berada pada kisaran angka kurang dari 2 persen dari GNP. Kemudian kalau diukur secara relatif terhadap APBN, hanya berada pada besaran angka yang lebih rendah dari 7 persen.

Itulah sebabnya kinerja pendidikan kita saat ini sangat terpuruk, meskipun pada akhir bulan Juli lalu lima siswa sekolah menengah umum (SMU) kita mampu menggondol tiga medali emas, satu perak, dan satu perunggu dalam Olimpiade Fisika Internasional. Mereka itu sebenarnya bukan representasi dari populasi siswa kita secara nasional. Mereka merupakan *outlier* dari populasi siswa SMU, sehingga tidak bisa dijadikan indikator yang parsimoni terhadap kualitas pendidikan bangsa ini secara nasional.

Program pendidikan kita tidak mampu berbicara pada tataran kualitas akibat tidak tersedianya dana secara memadai. Saat ini alokasi dana pendidikan kita sungguh amat kecil. Sebagai gambaran betapa kecilnya anggaran pendidikan, kita saat ini mendapatkan alokasi anggaran lebih kurang Rp 15 trilyun. Anggaran pendidikan itu tidak sampai mencapai 10 persen dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang macet, yang hanya bisa dinikmati oleh kelompok kecil komponen bangsa ini. Padahal, persoalan yang harus dihadapi oleh bidang pendidikan sangat luas, seperti ribuan kelas dan sekolah yang rusak berat, yang saat ini tidak dapat digunakan untuk proses belajar-mengajar, rendahnya gaji guru dan dosen, sangat kumuhnya lingkungan sekolah dan kampus-kampus perguruan tinggi, tertinggalnya sarana prasarana dan teknologi pendidikan, tidak adanya buku ajar dan bahan bacaan yang memadai, dan jutaan anak-anak usia sekolah yang *drop out*. Untuk membiayai operasional dalam tataran *status quo* saja sudah mengalami kesulitan. Akibatnya, kinerja pendidikan tidak optimal.

Pada perubahan keempat UUD 1945 yang saat ini sedang dan akan dilakukan oleh MPR, kalau terjadi kesepakatan untuk itu, telah disiapkan konsep pasal yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan harus berada pada besaran 20 persen dari APBN. Dulu, ketika masih berupa konsep, semua fraksi konon pernah sepakat untuk mempertahankan itu. Tetapi, ada yang khawatir pencantuman pasal seperti itu dalam UUD. Jika keuangan negara

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Him/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

tidak mencukupi untuk memenuhi pasal itu, implikasi politisnya sangat riskan. Presiden, siapa pun orangnya, sewaktu-waktu bisa dilengserkan dengan alasan melanggar UUD. Sebaliknya, ada juga yang belum yakin bahwa besaran 20 persen dari APBN itu cukup menjamin tersedianya dana yang memadai bagi sektor pendidikan dengan dalih, kalau APBN-nya itu sendiri kecil, maka angka absolutnya juga pasti akan rendah.

Apa pun argumentasinya, memang sudah saatnya sektor pendidikan diberdayakan dengan meningkatkan anggaran pendidikan secara signifikan. Dalam sejarah perkembangan negara-negara yang saat ini sudah maju, tak ada satu pun di antara mereka yang bangkrut akibat dari alokasi dana pendidikan yang lebih besar atau sama dengan 20 persen dari APBN. Bahkan, jika hal itu dapat dilakukan di Indonesia, justru akan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara signifikan melalui *multiplier effect* secara ekonomi dari pengeluaran negara di sektor pendidikan.

◆ PROF SUYANTO PHD
Rektor Universitas Negeri Yogyakarta

Perpustakaan Unikom

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : Selasa / 11 / Juni / 2002
Hlm/Kolom : 5 / 1
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : SUYANTO
Subjek / NO. KLASIF : PENDIDIKAN / 379

Pendidikan Nasional dalam Amandemen UUD 1945

Akhir-akhir ini banyak pihak di masyarakat serius menggulirkan wacana pro-kontra terhadap perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan berbagai argumentasinya. Anehnya, sejak UUD 1945 dirubah sampai ketiga kalinya, bahkan memasuki perubahan keempat, tidak banyak pihak di masyarakat yang mempersoalkan pendidikan secara mendasar dalam agenda perubahan itu.

Persoalan yang menarik perhatian berbagai pihak adalah pasal-pasal yang terkait masa jabatan presiden, sistem pemilihan presiden, hak asasi manusia, susunan keanggotaan MPR/DPR, perekonomian (Pasal 33), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), utusan golongan, bikameral versus monokameral dan sebagainya. Semua persoalan itu seolah mampu menghipnotis sebagian besar komponen bangsa ini untuk tidak memperdebatkan pendidikan secara intens, dalam konteks pembangunan masa depan bangsa yang perlu mendapat jaminan konstitusi secara kokoh, aspiratif, dan pro-aktif.

Memang, pernah ada salah satu komponen pendidikan, yaitu anggaran pendidikan yang diusulkan sebesar 20 peresen dari APBN, menjadi wacana dalam masyarakat pada awal April 2002. Namun, wacana perlu tidaknya pendidikan dibiayai dengan besaran 20 persen dari APBN, yang telah mendapatkan kesepakatan semua fraksi di MPR, hanya berlangsung sehari, saat wacana itu muncul di harian Ibu Kota.

Menurut teori *content analysis*, hal ini mengindikasikan, pendidikan belum menjadi prioritas penting bagi bangsa ini untuk menyiapkan masa depan generasi muda menghadapi persaingan global yang nyata tahun 2010 dan 2020. Setiap wacana dan isu nasional mengenai substansi pendidikan muncul di media massa, selalu saja segera tergusur isu-isu politik, ekonomi, dan hukum. Kita belum sadar bahwa sistem ekonomi, politik, dan hukum, yang katanya akan direformasi, dan diperbaiki demi kemaslahatan berbangsa dan bernegara sebenarnya juga mutlak memerlukan sentuhan tangan dan nurani yang arif dan bijak dari semua anak bangsa ini setelah mereka mengalami proses pendidikan yang mampu memberdayakan secara intelektual, kultural, moral, dan emosional.

Pendidikan-pengajaran

The founding fathers kita dalam menyusun UUD 1945 tampaknya belum sempat memberi arahan dan koridor yang rinci di bidang pendidikan. Hal ini tampak jelas jika kita menyimak Bab XIII, Pasal 31 UUD 1945. Pasal 31 Ayat (1) berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran; Kemudian Ayat (2) dengan tegas menyebutkan: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Akhirnya Pasal 32 dari Bab XIII itu berbunyi: Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Dari Bab XIII, tentang pendidikan, tampak ada ketidaksesuaian antara tema bab dan ayat-ayat yang mengikutinya. Semua pasal yang ada dalam Bab XIII tak satu pun menyebut kata pendidikan. Karena itu, Bab XIII mengenai pendidikan perlu dirubah secara mendasar. Artinya terminologi pendidikan juga harus tampak dalam ayat-ayat yang menjelaskan dan mengaturnya. Hal ini menjadi penting ketika kita menyimak hasil perubahan pertama yang ada dalam Bab XA, mengenai Hak Asasi Manusia. Dalam Bab XA, Pasal 28C Ayat (1) disebutkan: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat manusia.

Dari Bab XA, hasil amandemen pertama UUD 1945 tampak jelas, salah satu hak asasi manusia yang penting adalah hak untuk mendapat pendidikan, bukan pengajaran semata. Karena itu, agar konsisten dengan jiwa dan semangat Bab XA, maka dalam Bab XIII juga harus mengatur tentang pendidikan dalam ayat-ayatnya secara jelas. Ketika amandemen pertama dilakukan seharusnya MPR juga mengkaji Bab XIII. Ternyata hal itu tidak terjadi. Padahal, kualitas pendidikan kita kini sungguh amat parah dan amat tertinggal jika dilakukan *benchmarking* eksternal dengan negara sesama ASEAN seperti Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei, dan lebih-lebih dengan Singapura. Karena itu, agar pemerintah mendatang memiliki *political will* yang kuat terhadap sektor pendidikan, maka amandemen UUD 1945 yang kelima harus berani mencantumkan kata pendidikan dan pengajaran pada Pasal 31 Ayat (1), sehingga akhirnya berbunyi: Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran; dan ayat (2) menjadi: Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan dan pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Untuk masa mendatang, pemerintah harus memiliki *political will* yang kuat terhadap pendidikan. Tanpa *political will* yang kuat, tidak mungkin terjadi proses akselerasi pembangunan yang memanusiakan manusia di negeri ini. Dilihat dari aspek pedagogi, tanpa

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

menyebut kata pendidikan dalam ayat-ayat dari Bab XIII, pada tataran praksis pendidikan itu sendiri, akan terjebak proses pengajaran semata. Proses pengajaran hanya menekankan aspek persekolahan yang selalu berorientasi pada hasil-hasil belajar yang dapat diukur secara kuntitatif.

Sebaliknya, aspek pendidikan yang memiliki tugas dan kewajiban untuk membentuk kepriadilan, watak, moral, dan nurani siswa akan terabaikan. Bila ini terjadi lagi, kita akan lebih banyak melahirkan tamatan sekolah yang tidak memiliki sistem nilai dalam kehidupannya. Nilai-nilai kejujuran, patriotisme, cinta bangsa dan negara, empati terhadap sesama warga yang memiliki perbedaan secara etnis, keagamaan, dan kultural tidak akan dapat ditumbuhkembangkan dalam hati sanubari para siswa. Karena itu, sekali lagi dalam Bab XIII, mengenai pendidikan, perlu diamandemen secara mendasar agar ada kejelasan bahwa pasal yang ada dalam bab itu meregulasi pemerintah agar memiliki *political will* kuat guna memajukan pendidikan bangsa.

Pilar penting

Demokrasi menghendaki partisipasi aktif dan bertanggung jawab dari semua warga negara. Keputusan penting dalam konteks demokrasi akan menjadi baik, bernilai, dan memiliki akuntabilitas publik manakala keputusan itu dibuat warga negara yang terdidik akal, budi, dan nuraninya. Karena itu, pendidikan merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi tidak akan berjalan baik jika masyarakat yang mendukungnya tidak terdidik. Kesepakatan politik sebagai hasil kompromi yang demokratis akan gampang sekali dihancurkan kerumunan massa yang dengan sengaja memaksakan kehendak untuk mengubahnya secara tidak demokratis. Jangankan kesepakatan dan kompromi politik, pagar besi pun akan roboh dalam waktu singkat karena ulah warga negara yang kurang paham akan aturan main dalam kehidupan demokrasi sebagai akibat kurang terdidiknya mereka.

Oleh karena itu, untuk mengamankan dan mendorong pertumbuhan demokrasi di negeri ini pendidikan dapat digunakan sebagai instrumennya. Jika demikian, amat layak kiranya dalam perubahan UUD 1945 yang keempat nanti MPR memikirkan perubahan Bab XIII secara lebih jelas agar pendidikan memiliki jaminan konstitusi yang kuat, dan dengan demikian undang-undang yang mengaturnya lebih lanjut juga memperoleh pijakan konstitusi yang kokoh.

Untuk memperbaiki krisis saat ini tidak bisa tidak kita harus memperbaiki pendidikan nasional. Keberhasilan perbaikan pendidikan secara nasional akan mendorong keberhasilan reformasi di bidang hukum, politik, dan ekonomi. Kehidupan sistem hukum, politik, dan ekonomi sungguh memerlukan dukungan sumber daya manusia yang handal dalam aspek kualitasnya. Untuk kepentingan ini pendidikan perlu dijadikan kebutuhan penting bagi seluruh komponen bangsa.

Konsekuensinya, UUD 1945 harus mengaturnya secara jelas. Rambu-rambu penting yang perlu diatur ialah mengenai sistem dan manajemen pendidikan dan pengajaran, kewajiban dan tanggung jawab negara dalam mendidik bangsa ini, kewajiban warga negara dalam pendidikan, dan fungsi pendidikan dan pengajaran bagi pemberdayaan bangsa. Dengan mengamandemen Bab XIII UUD 1945 menjadi lebih kelihatan aspek pendidikannya, kita bisa berharap bangsa ini akan mendapatkan kesempatan yang baik untuk mendidik dirinya sendiri setelah diberi pedoman melalui sebuah undang-undang dan praksis pendidikan yang demokratis dan egaliter.

PROF SUYANTO PHD
Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Alumnus Boston dan Michigan State University, USA

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 21 / JUNI / 2002
Hlm/Kolom : 4 /
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : SIRAJ, SAID AQIL
Subjek / NO · KLASS : PENDIDIKAN / 379

Pendidikan Sufistik di Era Multikultur

SEJAK awal budaya manusia, pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosialisasi dan enkulturasi yang menyebarkan nilai-nilai dan pengetahuan-pengetahuan yang terakumulasi di masyarakat. Dengan berkembangnya masyarakat, berkembang pula proses sosialisasi dan enkulturasinya dalam bentuknya yang diserap secara optimal.

Dewasa ini pendidikan terlihat lebih mengupayakan peningkatan potensi intelegensia manusia. IQ telah menjadi sebuah "patok absolut" dalam melihat tingkat progresivitas kedirian manusia. Manusia dituntut mengasah ketajaman intelektualnya demi kemampuan mengoperasikan mekanisme alam yang menurut Jurgen Habermas, menghunjamnya hegemoni *ratio* instrumentalis. Produk dari instrumentalisasi intelek ini adalah terbangunnya manusia-manusia mekanis yang kering dari nuansa kebasahan ruang diri, atau dalam istilah Herbert Marcuse, *one dimensional men*

Era multikultur, era esoterisme

Multikulturalisme berkembang sebagai sekolah yang menaruh pentingnya keragaman sumber-sumber serta kantung-kantung budaya yang menjadi oasis penghayatan hidup dan acuan makna penganutnya, justru dalam penghayatan jagat-jagat nilai kelompoknya. Tuntutan multikulturalisme ini mekar bersama memadatnya kesadaran terhadap keterbatasan tradisi-tradisi besar yang setelah krisis monopoli tafsir kebenaran tunggal ternyata ambruk dalam rasionalisme demokrasi serta krisis-krisis kemanusiaan dan kuatnya teknologis-instrumental yang membuat hidup menjadi sempit satu dimensi.

Maka pendidikan pun perlu diarahkan untuk melakukan perombakan substansial menuju penyadaran hakiki dengan bertumpu pemaknaan hidup secara lebih *human*. Perubahan ini sepatutnya dibidikkan pada "wilayah esoteris" yang merupakan kesadaran hakiki yang berwatak multi dimensional.

Kesadaran esoteris senantiasa meneguhkan nilai-nilai keillahiahan yang menjadi sumber segala bentuk kesadaran. Padahal, kesadaran akan hadirnya kekuatan illahiah bisa menghadirkan kesadaran praksis yang amat signifikan bagi pengembangan kepribadian baik privat maupun sosial.

"Sufistic based education"

Di atas kondisi multikulturalisme, sebenarnya tersimpuh pemikiran yang berlandasan pendaman-pendaman *wisdom* yang menggelontorkan pemikiran yang substansial, universal, dan integral melalui jalur yang emansipatoris, moralis, dan spiritual. Sebuah pengayaan proses pendidikan yang berlambar nilai-nilai *adiluhung* tasawuf dengan tujuan praksis sosial.

Tasawuf sebenarnya bukan penyikapan pasif atau apatis terhadap kenyataan sosial. Seperti diteguhkan Dr Abu 'Ala al-Afifi, tasawuf berperan besar dalam mewujudkan sebuah "revolusi spiritual" di masyarakat. Bukankah aspek moral-spiritual ini sebagai *ethical basic* bagi formulasi sosial dalam hal ini juga dunia pendidikan? Kaum sufi adalah elite di masyarakatnya dan sering memimpin gerakan penyadaran akan adanya penindasan dan penyimpangan sosial.

Tasawuf sebagai [illegible] yang membimbing manusia kepada harmoni dan keseimbangan total. Interaksi kaum sufi dalam semua kondisi adalah dalam harmoni dan kesatuan dengan totalitas alam, sehingga perilakunya tampak sebagai manifestasi cinta dan kepuasan dalam segala hal.

Bertasawuf berarti pendidikan bagi kecerdasan emosi dan spiritual (ESQ) yang sebenarnya adalah belajar untuk tetap mengikuti tuntutan agama, saat berhadapan dengan musibah, keberuntungan, perlawanan orang lain, tantangan hidup, kekayaan, kemiskinan, pengendalian diri, dan pengembangan potensi diri. Bukankah lahirnya sufi sufi besar seperti Rabi'ah Adawiah, [illegible]

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

Ghazali, Sari al-Saqothi atau Asad al-Muhasabi telah memberi teladan, pendidikan yang baik, yakni berproses menuju perbaikan dan pengembangan diri dan pribadi.

Disadari, pendidikan yang dikembangkan masih terlalu menekankan arti penting akademik, kecerdasan otak, dan jarang sekali pendidikan tentang kecerdasan emosi dan spiritual yang mengajarkan integritas, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, keadilan, kebijaksanaan, prinsip kepercayaan, penguasaan diri atau sinergi. Akibatnya, berkecambahnya krisis dan degradasi dalam ranah moral, sumber daya manusia dan penyempitan cakrawala berpikir yang berakibat munculnya militansi sempit atau penolakan terhadap pluralitas.

Dalam tasawuf, antara IQ (*dzaka al-dzihni*), EQ (*tashfiatul qolbi*) dan SQ (*tazkiah al-nafsi*) dikembangkan secara harmonis, sehingga menghasilkan daya guna luar biasa baik horizontal maupun vertikal.

Sufi besar, Ibnu 'Arobi melihat, manusia perlu memekarkan apa yang disebut sebagai "daya-daya *khoyyal*" yakni suatu potensi daya dan kekuatan substansial yang mengejawantah secara hakiki, tetapi faktawi dan bergerak menuju pengungkapan diri dalam dunia indrawi yang merupakan bentuk abadi dan azali.

Demikianlah, manusia perlu dikembalikan pada "pusat eksistensi" atau "pusat spiritual" dan dijauhkan dari "hidup di pinggir lingkar eksistensi". Di tengah kondisi multikulturalisme, yang patut dipertahankan dan dikembangkan adalah penguatan pendidikan yang berbasis spiritualitas yang justru akan meneguhkan otentisitas kemanusiaan yang senantiasa dicitrai oleh ketuhanan.

PROF DR KH SAID AQIL SIRAJ MA
Doktor tasawuf, dosen Pascasarjana IAIN Jakarta

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 6 / FEBUARI / 2002
Hlm/Kolom : 7 / 1-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : SUYANTO
Subjek /NO. CLASS : PENDIDIKAN DAN NEGARA / 379.

Persoalan Klasik Anggaran Pendidikan Nasional

PERSOALAN anggaran pendidikan di negeri ini sungguh merupakan masalah yang amat pelik untuk dipecahkan. Hal ini terjadi karena sejak bangsa ini memproklamirkan kemerdekaannya, pendidikan belum pernah menjadi panglima bagi proses pembangunan nasional yang sanggup memberdayakan kehidupan bangsa Indonesia secara menyeluruh. Padahal, dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (yang tak akan pernah diamandemen sampai kapan pun), dengan jelas disebutkan bahwa pencerdasan kehidupan bangsa merupakan salah satu mandat yang amat penting untuk dilakukan bagi penyelenggara negara.

Dengan memahami makna Pembukaan UUD 1945 secara benar, seharusnya sejak dulu-dulu anggaran pendidikan memperoleh perhatian yang besar. Namun, hal itu tidak pernah terjadi karena ternyata penyelenggara negara ini secara kolektif sejak proklamasi kemerdekaan dikumandangkan tidak pernah memiliki keyakinan terhadap adanya kemanfaatan politis, jika melakukan investasi besar-besaran di dunia pendidikan. Konsekuensinya, pendidikan selalu tidak menjadi prioritas dalam setiap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Membiayai pendidikan memang ibarat melakukan investasi. Jadi, hasilnya baru dapat dilihat satu generasi berikutnya. Dengan demikian, untuk melakukan investasi di bidang pendidikan, perlu sikap dan kemauan politis pemerintah yang visioner. Sikap seperti itu tidak pernah terjadi sejak pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, maupun pemerintahan setelah tumbangnya Orde Baru sampai saat ini.

Sikap visioner di bidang pendidikan dapat kita lihat dari sejarah bangsa Jepang. Pada akhir Perang Dunia II, ketika Jepang kalah dalam peperangan itu, Kaisar justru bertanya kepada para pembantunya: berapa guru yang masih hidup. Ia bukan bertanya berapa tank yang masih tersisa atau berapa tentara yang masih hidup. Visi ini menunjukkan bahwa Jepang pada waktu itu akan dibangun ke masa depan, setelah remuk redam dalam Perang Dunia II dengan basis pembangunan sektor pendidikan. Hasilnya, seperti saat ini, mereka menguasai ekonomi dunia. Di Tanah Air kita saat ini tak satu daerah pun yang tidak disentuh oleh ekspor hasil teknologi Jepang sebagai mesin ekonominya.

Mestinya kita belajar dari kebenaran sejarah bangsa Jepang ini. Kalau mau begitu, tentu anggaran pendidikan harus mendapatkan analisis dan alokasi yang rasional, visioner, serta mampu memberdayakan sektor pendidikan secara nasional.

Dilihat dari sisi anggaran pendidikan, pemerintah mana pun yang sudah pernah berkuasa di negeri ini sampai saat ini belum ada yang memiliki *political will* (kemauan politik) yang positif terhadap sektor pendidikan. Anggaran pendidikan selalu berada amat jauh di bawah standar kebutuhan minimal, jika dibandingkan dengan anggaran pendidikan di negara-negara yang pendidikannya maju seperti Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Swedia. Negara-negara itu sudah memiliki *political will* yang baik terhadap sektor pendidikan. Oleh karena itu, anggaran pendidikan mereka rata-rata berada pada sekitar delapan persen dari GNP atau kalau diukur dengan APBN berada pada sekitar 30 persen dari APBN.

Oleh sebab itu, kinerja pendidikan mereka sangat bagus, berkualitas, sekaligus memiliki relevansi yang tinggi terhadap perkembangan teknologi. Sebaliknya, untuk saat ini anggaran pendidikan kita sungguh berada jauh di bawah standar kewajaran. Jika diukur dari GNP, anggaran pendidikan kita hanya berada pada kisaran angka kurang dari 2 persen dari GNP. Kemudian kalau diukur secara relatif terhadap APBN, hanya berada pada besaran angka yang lebih rendah dari 7 persen.

Itulah sebabnya kinerja pendidikan kita saat ini sangat terpuruk, meskipun pada akhir bulan Juli lalu lima siswa sekolah menengah umum (SMU) kita mampu menggondol tiga medali emas, satu perak, dan satu perunggu dalam Olimpiade Fisika Internasional. Mereka itu sebenarnya bukan representasi dari populasi siswa kita secara nasional. Mereka merupakan *outlier* dari populasi siswa SMU, sehingga tidak bisa dijadikan indikator yang parsimoni terhadap kualitas pendidikan bangsa ini secara nasional.

Program pendidikan kita tidak mampu berbicara pada tataran kualitas akibat tidak tersedianya dana secara memadai. Saat ini alokasi dana pendidikan kita sungguh amat kecil. Sebagai gambaran betapa kecilnya anggaran pendidikan, kita saat ini mendapatkan alokasi anggaran lebih kurang Rp 15 trilyun. Anggaran pendidikan itu tidak sampai mencapai 10 persen dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang macet, yang hanya bisa dinikmati oleh kelompok kecil komponen bangsa ini. Padahal, persoalan yang harus dihadapi oleh bidang pendidikan sangat luas, seperti ribuan kelas dan sekolah yang rusak berat, yang saat ini tidak dapat digunakan untuk proses belajar-mengajar, rendahnya gaji guru dan dosen, sangat kumuhnya lingkungan sekolah dan kampus-kampus perguruan tinggi, tertinggalnya sarana prasarana dan teknologi pendidikan, tidak adanya buku ajar dan bahan bacaan yang memadai, dan jutaan anak-anak usia sekolah yang *drop out*. Untuk membiayai operasional dalam tataran *status quo* saja sudah mengalami kesulitan. Akibatnya, kinerja pendidikan tidak optimal.

Pada perubahan keempat UUD 1945 yang saat ini sedang dan akan dilakukan oleh MPR, kalau terjadi kesepakatan untuk itu, telah disiapkan konsep pasal yang menyatakan bahwa anggaran pendidikan harus berada pada besaran 20 persen dari APBN. Dulu, ketika masih berupa konsep, semua fraksi konon pernah sepakat untuk mempertahankan itu. Tetapi, ada yang khawatir pencantuman pasal seperti itu dalam UUD. Jika keuangan negara

tidak mencukupi untuk memenuhi pasal itu, implikasi politisnya sangat riskan. Presiden, siapa pun orangnya, sewaktu-waktu bisa dilengserkan dengan alasan melanggar UUD. Sebaliknya, ada juga yang belum yakin bahwa besaran 20 persen dari APBN itu cukup menjamin tersedianya dana yang memadai bagi sektor pendidikan dengan dalih, kalau APBN-nya itu sendiri kecil, maka angka absolutnya juga pasti akan rendah.

Apa pun argumentasinya, memang sudah saatnya sektor pendidikan diberdayakan dengan meningkatkan anggaran pendidikan secara signifikan. Dalam sejarah perkembangan negara-negara yang saat ini sudah maju, tak ada satu pun di antara mereka yang bangkrut akibat dari alokasi dana pendidikan yang lebih besar atau sama dengan 20 persen dari APBN. Bahkan, jika hal itu dapat dilakukan di Indonesia, justru akan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara signifikan melalui *multiplier effect* secara ekonomi dari pengeluaran negara di sektor pendidikan.

◆ PROF SUYANTO PHD
Rektor Universitas Negeri Yogyakarta

Tanggal : 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 31 | 16
Hari /Bulan/ Tahun : RABU / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 4 / 5-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : SULARTO, St
Judul Artikel/ Berita : MASA Depan Yang Otentik : Membangun Subyek Politik
SUBJEK / HD KLASS / PENDIDIKAN DAN MEDIA KA / 370

Masa Depan yang Otentik

Membangun Subyek Politik

IRONIS, memang! Dalam suasana tegang-mencekam di Jakarta, di sebuah ruang perpustakaan, terselenggara sebuah diskusi yang intensif. Intensitas itu diukur dari kegairahan peserta, suasana ilmiah, dan rasa persaudaraan yang dibangun bersama. Semua sekat terpinggirkan. Semua peserta dan pemakalah/panelis terlibat dalam kebersamaan sebagai sesama, berusaha menemukan makna otentisitas masing-masing, yang terbangun dan memperoleh bobot justru dalam komunitas dengan yang lain.

Dalam konteks ini, ajakan panitia—B Kieser dan G Sindhunata—untuk dua hari meninggalkan kegerahan suasana, terutama menjelang istigotsah 29 April dan pembukaan Sidang Paripurna DPR 30 April, terpenuhi.

Selama dua hari, terutama dalam pertemuan-pertemuan di ruang diskusi, sangat sedikit disinggung persoalan politik yang hari-hari itu menjadi topik pembicaraan masyarakat. Entah karena memang dari proposal tidak tercantum masalah politik praktis-aktual, entah karena kekhusukan para peserta, topik-topik itu justru menjadi bahasan ramai di saat rehat minum atau makan siang, atau di saat menjelang istirahat malam. Masdar Mas'udi, misalnya, 28 April malam itu ditanggap—para penghuni kolese—hampir semua peserta diinapkan di Kolsani—karena dianggap tahu banyak masalah sekitar Nahdlatul Ulama (NU) dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Catatan akhir P Wiryono—pimpinan tertinggi Serikat Jesus di Indonesia—menggambarkan tantangan yang dihadapi bangsa ini, khususnya yang dihadapi oleh setiap orang—apa pun latar belakangnya—dalam mengembangkan jatidiri sebagai bagian sebuah komunitas masyarakat majemuk Indonesia.

Di antaranya dimajukan sejumlah pertanyaan: dalam suasana gerah, tegang-mencekam dan galau sekarang, masihkah kita bisa mempertahankan otentisitas masing-masing? Apakah akhir (finalitas) dari persoalan yang dihadapi bangsa-negara ini akan berakhir dengan kehancuran? Agaknya kok tidak, kata Wiryono. Masih ada harapan. Di antaranya dia ulang kembali kenyataan yang disampaikan Mgr Suharyo, bahwa kini marak berkembang kelompok-kelompok alternatif atau kelompok kontras, yang bertahan dan mengembangkan alternatif-alternatif menjanjikan. Kelompok-kelompok itu mempersatukan banyak orang dengan berbagai latar belakangnya, menjadi satu kesatuan.

Mengapa suasana tidak otentik, suasana di mana berkembang semangat kepalsuan dan orang tidak mau menunjukkan jatidirinya, berkembang subur di Indonesia? Tidak pernah dikembangkan satu sistem pendidikan yang membebaskan. Tidak ada pendidikan politik bagi rakyat, sebuah praksis pendidikan yang mengembangkan otentisitas setiap manusia dikembangkan dalam sebuah komunitas majemuk.

Pemikiran dan teladan dua proklamator Kemerdekaan Indonesia, Bung Karno dan Bung Hatta, topik ini disampaikan P Swantoro, dalam kaitan ini layak dan aktual dijadikan referensi. Begitu pulang dari Belanda tahun 1932, Hatta langsung menaruh perhatian pada pendidikan dan bukan mendirikan partai politik. Pendidikanlah yang terpenting, kata Hatta, baik itu pendidikan bagi rakyat banyak maupun khususnya bagi mereka yang hendak terjun dalam perjuangan politik. Ia menolak cara-cara agitasi dan pengerahan massa seperti yang dilakukan Soekarno. Ia tekankan pendidikan budi dan pekerti. Perjuangan politik menuntut *karakter-sterkte*, ketangguhan moral, kesediaan berkorban.

Dikutip oleh Swantoro, lewat nama majalah *Daulat Ra'yat*—nama majalah itu berasal dari Hatta—Hatta mau ditunjukkan cara yang benar terhadap rakyat. Dalam sikap itu "asas kerakyatan"-lah yang menjadi pegangan, baik dalam kehidupan politik, perekonomian maupun pergaulan sosial. Rakyat adalah jantung suatu bangsa. Rakyat itu menjadi ukuran tinggi-rendahnya derajat para pemimpin. Hidup atau matinya rakyat Indonesia bergantung dari semangat rakyat. Para penganjur dan golongan terpelajar baru berarti kalau di belakangnya ada rakyat yang sadar dan insaf a[illegible] kedaulatan dirinya.

◆◆◆

SUBYEK politik atau bodi politik, sebuah istilah yang masih asing dalam masyarakat umum tetapi sudah disebut-sebut pada diskusi ketulusan setahun lalu (1 dan 2 April 20[illegible] muncul kembali. Maksud[illegible] bagaimana setiap orang bisa mengambil keputusan atas dirinya sendiri, yang dimotivasi oleh perjumpaan dan perg[illegible] annya dalam sebuah masy[illegible] kat majemuk. Dengan begitu dia menjadi subyek politik.

Subyek politik ini penting, se[illegible] menyangkut masa depan se[illegible] orang. Mengenai masa de[illegible], pertanyaan yang diajukan bukannya mengenai dampak masa depan bagi kita, tetapi kita—masing-masing individu—sadar atau tidak sadar—membentuk masa [illegible]. Sehingga rumusan pertanyaan tentang masa depan yang otentik, seharusnya berbunyi: apa yang dapat kita wujudkan untuk masa depan? Untuk bisa menjawabnya, mestilah terbentuk dulu setiap ma[illegible] sia sebagai subyek politik, se[illegible] gai bodi politik yang bertindak.

Kenyataannya, di Indonesia belum tampak usaha serius untuk membentuk bodi politik. Ketika rakyat ingin berdemokrasi, dalam praktik, orang sudah puas dengan dapat berunjuk rasa menuntut perbaikan pelayanan. Orang puas berpolitik ibaratnya mereka puas memilih tawaran-tawaran di toko, misalnya, antara memilih membeli obat modern atau obat tradisional. Karena itu dibutuhkan

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Hari /Bulan/ Tahun : ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Judul Artikel/ Berita : .....
.....

lembaga politik, partai politik dan usaha demokrasi, yang melibatkan orang menjadi warga yang ikut memikirkan dan mewujudkan cita-cita kebersamaan di masa depan. Singkatnya satu usaha terus-menerus membangun bodi politik.

Suara hati, kata Martha Driscoll, muara terakhir seseorang menjadi subyek politik, pada zaman kita semakin kabur artinya. Istilah "menurut suara hati" menjadi ambigu dan kabur. Diartikan suara hati selalu benar, bahwa tidak ada kewajiban untuk membentuk hati nuraninya sesuai dengan norma-norma obyektif, bahwa kebenaran adalah hal yang mutlak subyektif, bahwa setiap manusia berhak untuk mengikuti suara hati tanpa mempedulikan orang lain. Tetapi sebenarnya hati nurani adalah pertimbangan melalui mana seorang pribadi memeriksa kebaikan/kejahatan dari suatu tindakan tertentu menurut kriteria hukum yang tertulis dalam hatinya.

Menyangkut suara hati dan hati nurani, menurut Syafii Maarif, sebagian kita telah mengalami kelumpuhan dan kemandulan logika untuk menyelamatkan hari depan. Kita telah kehilangan kepekaan terhadap nasib sesama yang mati untuk sesuatu yang tidak jelas. Indonesia kini ibarat kapal bocor yang sedang oleng, terapung-apung di laut lepas menunggu karam, sementara nakhodanya seperti tidak punya kompas.

Akibatnya, kalau nurani dan logika sudah tak lagi berfungsi dengan baik, maka adakah harapan bahwa kita akan berhasil? Atau memang kebaikan, kecerahan, dan otentisitas itu sudah merupakan sesuatu yang tak terjangkau? Memang egoisme politik dan sikap serakah terhadap kekuasaan dan benda selama ini merupakan penyebab utama mengapa nurani menjadi lumpuh dan logika menjadi mandul. Sepanjang zaman dan pada semua unit peradaban, kekuasaan tanpa landasan moral yang kuat, pasti menyebabkan orang lupa. Fenomena mabuk kekuasaan dapat dikatakan sebagai kencenderungan umum dalam perjalanan sejarah umat manusia, tidak peduli apakah mereka mengaku punya agama atau tidak.

Digambarkan secara plastis oleh Mgr Suharyo, yang terusik oleh papan iklan di pinggir utara Kota Yogyakarta. Di papan itu tergantung lukisan sebuah mulut manusia yang besarnya melebihi kepalanya sendiri. Dalam mulutnya ditaruh berbagai buah-buahan dalam bentuk utuh. Yang tergambar di sana bisa saja bukan buah-buah yang sangat enak, tetapi keserakahan. Manusia memang gampang serakah apalagi kalau didukung oleh kekuasaan dan senjata. Dan saat ini, akar kekacauan yang bersumber dari keserakahan itu terjadi secara menyeluruh.

Masih adakah harapan? Masih. Sejumlah penggerak masyarakat yang hadir di berbagai tempat menawarkan cita-cita dan penghárapan. Ternyata dalam dunia yang dilanda krisis ini, pada tingkat akar rumput masih ada orang yang tidak hanyut dalam budaya keserakahan. Mereka membentuk komunitas-komunitas kontras atau komunitas-komunitas alternatif, di antaranya Pelayanan Sosial Garam di Semarang, yang mengadakan pelayanan pendampingan pada anak-anak. Dan mereka memilih pendampingan anak-anak dari keluarga tidak mampu dan tidak pandai, kelompok anak-anak paling miskin dari antara yang miskin. Konkretnya, yang ingin ditunjukkan oleh kelompok kontras ini adalah budaya berbagi.

◆◆◆

PERTEMUAN dua hari itu bukan bagian dari sebuah aksi. Dia adalah teguran alternatif, rangsangan untuk mengingatkan tentang jati diri setiap manusia untuk mampu bertindak sebagai subyek politik. Dia menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai ketidakpastian sekarang. Dia menjadi acuan bagi kerja dan upaya kita menyelamatkan masa depan bangsa yang kini sedang terancam oleh kekuatan-kekuatan disintegratif yang amat mengkhawatirkan.

Pengkhianatan kita terhadap dasar negara dan bangsa di masa lampau, khususnya yang menyangkut dimensi keadilan, harus diakui jujur dan tulus dan kita berjanji tidak mengulanginya lagi. Dengan pengakuan itu tercipta satu masa depan yang lebih baik, lebih adil, dan otentik.

Lantas, apakah masa depan otentik bagi subyek (bodi) politik? Di antaranya, menurut Magnis, individu mantap dengan diri sendiri karena secara positif tertanam dalam identitas komunitas sosial-kulturalnya. Makin mantap dan otentik seseorang menghayati diri dalam konteks-konteks berlapis dalam komunitasnya, makin mudah ia secara otentik (*authos*=sendiri dan *tenthos*=yang dibuat oleh pelaksana), mantap dengan, terbuka terhadap, positif kepada orang dan komunitas dengan identitas sosial yang lain. Akibatnya warga masing-masing komunitas semakin mampu tidak merasa terganggu dengan kenyataan pluralisme budaya, suku dan agama dalam lingkungan hidup sehari-hari.

Dan, berani mengambil keputusan sesuai dengan hati nurani, yang melawan arus umum masyarakat pun, bukankah bagian dari upaya membangun bodi (subyek) politik? ◆

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SELASA / 1 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 39 / I-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : SURAKHMAD, Winarno
Subjek | NO. KLASS : PENDIDIKAN - INDONESIA - SEJARAH | 370.9

Menjernihkan Reformasi Pendidikan Nasional

PENDIDIKAN apakah yang sesuai untuk sebuah daerah otonom? Ini ditanyakan oleh seorang dari daerah. Jawaban ala ebtanas oleh seorang dari pusat adalah "Otonomi Pendidikan". Tanya lagi: Apakah otonomi pendidikan itu? Jawabnya: "Ya, itu tadi. Pendidikan yang dibangun sesuai untuk keperluan daerah otonomi." Pertanyaan berikut: Tetapi, apakah esensi konsep itu? Maka, jawabnya: "Sebenarnya, saya juga tidak tahu."

DIA tidak tahu! Ternyata bukan dia saja yang tidak tahu. Banyak orang tidak tahu. Bahkan, kebanyakan orang tidak tahu. Atau mungkin: Tidak seorang pun tahu! Tetapi, karena pendidikan tersebut telah diberi imbuhan kata otonomi, dan karena otonomi adalah konsep yang sedang hangat, maka selamatlah istilah itu. Hiduplah otonomi pendidikan!

Sebagai istilah, otonomi(sasi) pendidikan tidak perlu salah kalau saja kita bisa merumuskan sebuah referen yang tepat. Malangnya, tidak ada orang yang peduli untuk merumuskannya, tidak di pusat tidak di daerah, walaupun ketika istilah ini sudah mulai mewabah. Maka, menjadilah istilah otonomi pendidikan sebagai istilah kosong. Tidak bermakna, karena tidak berisi apa-apa untuk pengembangan pendidikan nasional dalam konteks Indonesia. Menyesatkan, karena dianggap sebagai panasea yang pada dasarnya justru adalah satu di antara sejuta masalah pendidikan yang melanda negeri ini. Berbahaya, karena dalam posisi yang *amorf*, kita justru cenderung menggunakannya sebagai kunci keberhasilan reformasi pendidikan.

Ini bukan satu-satunya kasus penamaan yang telah menimbulkan masalah. Di masa lalu, banyak masalah "dipecahkan" dengan jalan menemukan nama baru, sampai datang waktunya lagi untuk menggantinya dengan istilah yang lebih baru. Kalau seorang Menteri Pendidikan memutuskan agar masalah IKIP diperbaiki dengan mengubahnya menjadi universitas, maka maksudnya tentu bukan hanya mengganti nama. Sekarang IKIP sudah dinamakan universitas. Tetapi, apakah penamaan itu benar-benar telah menjadikannya universitas? Dan, kalau kebetulan telah bisa menjadi universitas, apakah masalah paling mendasar—pendidikan guru profesional—lalu terpecahkan? Apakah semua itu sudah *linked* dan *macth*? Siapa yang peduli!

Kalau kita berbicara tentang pembaruan seperti itu, di dunia pendidikan tidak kurang banyaknya. Kalau gaya seperti ini dapat disebut reformasi, maka pendidikan di Indonesia sudah *terliwat* sering dan *terliwat* banyak direformasi. Banyak sekali usaha perubahan seperti itu. Tetapi, pada akhirnya kita menjadi masygul karena sesudah melembagakan perubahan demi perubahan, ternyata bahwa tidak satu pun yang berubah. Semua masih tetap seperti sediakala! Ini terjadi terutama karena kita telah menjebak diri di dalam tirani nomenklatur. Kita tidak sanggup bergerak melampaui tahap peristilahan. Alhasil, yang berubah hanya istilahnya yang tidak tersentuh adalah substansinya. *Error. Error.*

Desentralisasi berpotensi eksplosif

Sebagai barang baru yang belum dikenal, perubahan (baca: reformasi) lebih sering dilihat sebagai ancaman, atau sedikitnya sebagai beban, bukan sebagai potensi alternatif. Memang betul, reformasi sering kali berarti rupanya dinilai merepotkan. Tidak mengherankan bahwa sekolah yang dipertaruhkan sebagai lembaga pendidikan untuk merintis kemajuan, sering kali justru lebih sukar berubah dibandingkan dengan berbagai prahara sosial budaya di dalam masyarakat. Mau reformasi, tidak mau berubah. Hari ini, sesudah 50 tahun lebih, sejauh mana kita dapat menemukan bukti-bukti bahwa sekolah adalah lembaga perintis kemajuan? Sekolah gaya masa lalu sudah tidak diperlukan, tetapi mampukah sekolah hari ini mengadakan *salto martoles*? Sungguh susah!

Walau menerima perlunya perubahan, tidak semua potensi pendidikan—laten dan aktual—siap menerima konsekuensinya, bahkan mungkin, belum dapat mengantisipasi konsekuensi tersebut. Dengan perkataan lain, kecuali kita tidak dapat berasumsi bahwa semua potensi pendidikan sama-sama menginginkan perubahan pendidikan dengan hakikat dan wujud yang jelas, kita juga tidak dapat berasumsi bahwa di dalam era reformasi ini semua pihak telah mengetahui dengan jelas konsep, implikasi, dan konsekuensi reformasi pendidikan yang dituju. Padahal, di dalam gerakan desentralisasi pendidikan, justru kejelasan itu menjadi syarat mutlak untuk keberhasilan pendidikan daerah. Bukan besok, tetapi sekarang.

Kekaburan konseptual masih terdapat di mana-mana. Bukan hanya di daerah, tetapi juga di pusat. Di dalam dunia pendidikan sendiri pun, dunia persekolahan dan birokrasi khususnya, kondisi negatif seperti itu masih dominan. Dengan kondisi semacam itu, maka risiko *detrimental* yang dihadapi di dalam era otonomi(sasi) ini akan menjadi berlipat ganda besarnya dibandingkan dengan risiko di masa lalu. Selagi sikap murah hati masyarakat masih memungkinkan pendidikan membuktikan kegunaannya, sekaranglah waktunya untuk berpikir benar dan bertindak benar.

Apa makna pendidikan nasional ketika masyarakat mulai memusatkan perhatian mereka pada perkembangan pendidikan di daerah (otonomi) masing-masing dan berbicara tentang pendidikan regional? Apa yang mutlak harus terjadi di dalam proses peralihan titik tumbuh pendidikan, dari yang terpusat ke

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun
Hlm/Kolom
Sumber
Penulis
Subjek
Kompas / Pikiran Rakyat /

yang terdesentralisasi, di dalam konteks negara kesatuan? Bagaimana memastikan keberhasilan strategi pengelolaan program pendidikan dan peningkatan mutu berbasis sekolah, di sekolah yang hampir-hampir tidak memiliki *inersia* untuk bangkit? Adakah alasan yang kuat untuk kita sekarang berbicara tentang peningkatan mutu? Mutu yang mana, dan dimulai dari mana? Jawabannya belum siap.

Dalam skala nasional, untuk sedikitnya lima tahun mendatang, banyak hal yang kalau dibiarkan terkatung-katung, hanya akan mempercepat kegagalan pendidikan, yang akan bermuara kepada kegagalan desentralisasi, yang pasti berdampak pada kegagalan berbangsa. Bagaimana membina sebuah ekosistem pendidikan yang memungkinkan pendidikan tumbuh di atas basis masyarakat? Dari sekian banyak peralihan paradigma reformatif, yang pada umumnya sangat kental bersifat inofatif dan demokratis, bagaimana memastikan keberhasilannya di dalam lingkungan sosial budaya yang masih sangat kental bersifat tradisional dan feodalistik? Jawabannya belum ada. Problematiknya saja pun belum dirumuskan. Padahal, menunda penanganannya akan berarti menjadikan masalah lebih eksplosif.

Pendidikan lokal itu pun pendidikan nasional

Karena karakteristik setiap perubahan adalah kebaruan, dan karena urilitas perubahan bersifat kontekstual, kita tidak dapat berkesimpulan bahwa hakikat kebaruan itu sudah dipahami dengan jelas sebelum masyarakat umumnya, dunia pendidikan khususnya, memutuskan untuk menerima perubahan. Akan sangat berbahaya apabila pemerintah pusat beranggapan bahwa dengan adanya otonomi pemerintahan, maka tugas setiap daerah otonom tinggal lagi mendaerahkan (mengotonomikan?) pendidikan, tinggal lagi menjadikan sekolah sebagai basis pengelolaan peningkatan kualitas, tinggal lagi mengontekstualkan kurikulum, tinggal lagi berusaha mencapai mutu minimal secara nasional. Kalau anggapan ini benar, maka proses kehancuran telah berjalan!

Konsep desentralisasi pendidikan adalah konsep baru bagi Indonesia. Tidak ada orang Indonesia yang telah berpengalaman. Tidak seorang pun. Pemerintah juga tidak. Jadi, ketika kita berbicara dengan para bupati, para guru, orangtua, dan masyarakat luas tentang konsep tersebut, apakah kita benar berbicara dengan landasan falsafah, visi, konsep, dan strategi yang sama, walaupun dalam bahasa Indonesia yang sama? Sangat disangsikan. Kalau begitu, tidak mungkinkah pendidikan nasional dengan parameter yang baru ini akan menjadi sebuah awal kekacauan yang eksplosif? Kalau pengamatan ini benar (mudah-mudahan salah sama sekali) sebaiknya kita berhenti bermimpi mengenai peningkatan mutu. Mempertahankan mutu saja belum tentu kita sanggup.

Sekarang pun sudah muncul tanda-tanda bahwa kemerosotan mutu sedang terjadi dalam kualitas dan intensitas yang melebihi derasnya proses kemerosotan mutu pada era pemerintahan yang lama. Kalau kecenderungan ini berlanjut, maka kemerosotan mutu pendidikan—dalam dimensi regional, nasional, dan global—akan berlanjut secara akseleratif sehingga dalam waktu kurang dari lima tahun akan terjadi proses deteriorasi yang melebihi proses yang terjadi selama 30 tahun pendidikan masa lalu. Dan ini akan melahirkan reaksi berantai, yang semakin lama semakin tidak terjinakkan. Dari terancamnya hak kependidikan setiap anak sampai pada terancamnya eksistensi pendidikan nasional. *Ad infinitum.*

Menerobos dominasi paradigma lama

Di atas segala-galanya, kita semua harus dengan sadar menempatkan masa depan bangsa sebagai prioritas utama. Untuk masa depan tersebut, kita tidak boleh lagi terbiasa berkompromi dengan kualitas karena kita harus menghasilkan hanya yang terbaik untuk generasi mendatang. Kalau kita benar-benar meyakini bahwa pendidikan harus berperan memanusiakan dan membudayakan manusia, maka kita harus menghancurkan segala paradigma lama yang menurunkan harkat mereka sebagai manusia. Inilah juga yang dituntut dari pemerintah, baik di daerah maupun di pusat.

Dalam konteks Indonesia, pendidikan juga harus berperan mengindonesiakan anak bangsa, karena kegagalan kita di dalam tugas ini akan berakibat pada rapuhnya landasan mental bangsa ini sebagai satu bangsa. Dengan mengambil hikmah pengalaman sejauh ini, kita harus sadar bahwa pendidikan yang terbukti tidak pernah dapat ditumbuhkan dari atas karena tidak alami, juga tidak pernah dapat ditumbuhkan dari bawah tanpa pengertian dan tindakan yang benar. Tidak ada jaminan yang memastikan bahwa desentralisasi pendidikan, akan berhasil. Tidak ada jaminan bahwa pendidikan nasional besok akan menjadi lebih baik dari hari ini. Tetapi, kita tidak boleh gagal lagi. Kita harus memperjuangkan keberhasilan.

Kunci keberhasilan ada di tangan semua pihak. Tetapi, yang terutama menentukan adalah keserasian kerja sama dan ketepatan pembagian wewenang serta tanggung jawab antara dua mitra: pemerintah daerah di satu pihak, pemerintah pusat di lain pihak. Sekarang, kartu yang harus lebih dahulu turun adalah yang di tangan pemerintah pusat. Bersama-sama dengan para pendidik di daerah, dalam waktu sesingkat-singkatnya perlu tercipta kesamaan persepsi mengenai berbagai hal yang mendasar, yang menyangkut kepentingan nasional. Pemerintah pusat perlu berperan jauh lebih pro-aktif dan antisipatif agar timbulnya berbagai kemungkinan yang negatif dapat dielakkan sedini mungkin. Pemerintah pusat harus bertanggung jawab terhadap setiap kegagalan di daerah; kegagalan di daerah mana pun, adalah kegagalan pendidikan nasional.

Pembagian kewenangan antara pusat dan daerah tidak berarti membagi pendidikan nasional dalam pendidikan pusat dan pendidikan daerah. Pendidikan di sebuah daerah mana pun tidak berarti kecuali pendidikan itu menempatkan diri sebagai bagian dari pendidikan nasional. Kekuatan dan kelemahan pendidikan nasional banyak ditentukan oleh kekuatan dan kelemahan pendidikan di daerah. Pendidikan daerah sekaligus adalah pendidikan nasional. Karena itu, pemerintah pusat berkewajiban untuk menjernihkan makna reformasi yang sekarang "diujicobakan" dalam skala nasional. Pemerintah pusat harus mampu menampakkan diri sebagai potensi yang bebas dari kungkungan paradigma masa lalu, dan senantiasa menekankan tujuan pada pembinaan pendidikan sebagai potensi pembinaan sebuah bangsa. ◆

(Prof Dr Winarno Surakhmad, *Direktur Education Consortium for Innovation And Quality Assessment; ECIQA)*